

SKRIPSI

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUTRI AULIAH AZANI

A011191004



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

SKRIPSI

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh :

PUTRI AULIAH AZANI

A011191004



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

SKRIPSI

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

PUTRI AULIAH AZANI

A011191004

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

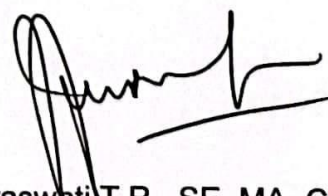
Makassar, 18 Juli 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, M. A., CRP.
NIP. 19590306 198503 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Indraswati T.R., SE. MA. CWM®
NIP. 19651012 199903 2 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

PUTRI AULIAH AZANI

A011191004

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 18 Juli 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, M. A., CRP.	Ketua	1. 
2.	Dr. Indraswati T.R., SE., MA., CWM®.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF.	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : PUTRI AULIAH AZANI
Nomor Pokok : A011191004
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 18 Juli 2023

Yang Menyatakan



PUTRI AULIAH AZANI

A011191004

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam tak lupa juga penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi tauladan bagi kita semua.

Skripsi dengan judul "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan", disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan serta saran dan masukan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan tidak luput dari kesalahan dan keterbatasan. Akan tetapi, penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dan menjadi pelajaran bagu penulis pribdai maupun para pembaca.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan cintai, yaitu untuk Ayah H. Azis, SE dan Ibu Hj. Subadriani Baharaong, SE yang telah memberikan banyak doa dan didikan serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan,

kebahagiaan, dan kemuliaan atas semua hal berarti yang telah mereka lakukan. Kepada Kakakku Muhammad Rizal Azis yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi. Kepada seluruh keluarga besar yang tidak sempat penulis sebutkan, terima kasih yang sebesar-besarnya.

Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu dengan segala kerendahan hati, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih terdalam dan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jajarannya.
3. Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Bapak Dr. Sabir SE., M.Si., CWM® dan Sekretaris Departemen Ibu Dr. Fitriwati, SE., M.Si. Terima Kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Ucapan terimakasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, MA., CRP selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Indraswati T.A. Reviane, SE., MA., CWM® selaku dosen pembimbing pendamping dalam penyusunan skripsi. Terima kasih atas arahan, bimbingan, saran dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses bimbingan skripsi, peneliti secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang menyinggung perasaan bapak dosen pembimbing. Semoga Allah SWT senantiasa

memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan Prof dan Ibu dosen pembimbing.

5. Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, MA., CRP selaku penasihat akademik penulis yang memberikan bantuan baik berupa arahan maupun motivasi kepada peneliti selama menjalankan studi di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
6. Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si dan Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF selaku dosen penguji. Terima kasih telah memberikan motivasi dan saran bagi peneliti untuk terus belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan dan nasihat kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Terima kasih kepada teman-teman grup sepejuangan masa kuliah, yaitu Indira, Ratna Sari, Nurul, Tariza, Wa Ode dan Dopen serta teman-teman Kopiten Fifi, Inayah, Adiva, Asridha, Rosa, Nur Rahmasari, Sefhia, Ina dan Ardi. Serta Nurul Udita sebagai teman sepejuangan dan teman nongki di e-lib. Dan tak lupa juga teman grup Lambe_Mata, yaitu Dwynjov, Erdekah, Astut dan Indiksss. Terima kasih hingga saat ini telah memberikan segenap bantuan baik itu arahan serta pemikiran yang sangat membantu peneliti serta terima kasih telah menemani saat suka maupun duka. Semoga seterusnya kita terus menjalin pertemanan hingga tua nanti. Aamiin.

9. Teman-teman GRIFFINS dan keluarga besar HIMAJIE. Terima kasih telah menemani saat suka maupun duka dalam berproses sebagai mahasiswa. Semoga cita-cita dan impian kita dapat tercapai. Aamiin.
10. Dan tentunya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi serta doa sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 18 Juli 2023

Putri Auliah Azani

ABSTRAK

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Putri Auliah Azani

Abd. Hamid Paddu

Indraswati T. R

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kapasitas Fiskal, Investasi dan Sumber Daya Manusia secara tidak langsung terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Adapun data yang digunakan yaitu data time series tahun 2000-2021 di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi TSLS (Two Stage Least Square) dengan menggunakan program Amos. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Kapasitas Fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi, 2) Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi, 3) Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Kapasitas Fiskal, Investasi, Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Wilayah

ABSTRACT

ANALYSIS OF ECONOMIC GROWTH AND REGIONAL INEQUALITY IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

Putri Auliah Azani

Abd. Hamid Paddu

Indraswati T. R

This study aims to examine and analyze the effect of Fiscal Capacity, Investment and Human Resources indirectly on regional inequality through economic growth in South Sulawesi Province. This study uses a quantitative approach. The data used is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics. The data used is time series data for 2000-2021 in South Sulawesi Province. The analytical method used is the TSLS (Two Stage Least Square) regression analysis method using the Amos program. The results of this study are 1) Fiscal Capacity has a negative and insignificant effect on regional inequality through economic growth, 2) Investment has a positive and significant effect on regional inequality through economic growth, 3) Human resources has a positive effect on regional inequality through economic growth.

Keywords: *Fiscal Capacity, Investment, Human Resources, Economic Growth, Regional Inequality.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Konseptual.....	11
2.1.1 Ketimpangan Wilayah.....	11
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	15
2.1.3 Kapasitas Fiskal	18
2.1.4 Investasi	21
2.1.5 Sumber Daya Manusia	23
2.2 Tinjauan Teoretis.....	26
2.3 Tinjauan Empiris.....	32
2.4 Kerangka Pikir Penelitian.....	34
2.5 Hipotesis Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	22
3.2 Jenis dan Sumber Data	22
3.3 Metode Pengumpulan Data	22
3.4 Metode Analisis Penelitian.....	22

3.4.1	Indeks Willismson.....	22
3.4.2	Metode Analisis Kuantitatif	38
3.5	Definisi Operasional Variabel.....	40
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1	Perkembangan Variabel Penelitian.....	42
4.1.1	Perkembangan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan	42
4.1.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan ..	44
4.1.3	Perkembangan Kapasitas Fiskal di Provinsi Sulawesi Selatan	47
4.1.4	Perkembangan Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan	49
4.1.5	Perkembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan ..	51
4.2	Hasil Estimasi	53
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	57
4.3.1	Pengaruh Kapasitas Fiskal Terhadap Ketimpangan Wilayah Melalui Pertumbuhan Ekonomi	58
4.3.2	Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Wilayah Melalui Pertumbuhan Ekonomi	60
4.3.3	Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Ketimpangan Wilayah Melalui Pertumbuhan Ekonomi	62
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....		68
LAMPIRAN.....		72

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perkembangan Nilai PDRB ADHK 2010 dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2021.....	45
Tabel 4.2	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2021	48
Tabel 4.3	Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2021	50
Tabel 4.4	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2021	53
Tabel 4.5	Hasil Penelitian.....	54
Tabel 4.6	Hasil Estimasi Pengaruh Tidak Langsung Variabel Kapasitas Fiskal, Investasi dan Sumber Daya Manusia Terhadap Ketimpangan Wilayah Melalui Pertumbuhan Ekonomi.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021.....	3
Gambar 1.2	PDRB perkapita ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah).....	4
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir Penelitian	35
Gambar 4.1	Ketimpangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2021	43
Gambar 4.2	Bagan Kerangka Hasil Penelitian	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya proses pembangunan di suatu wilayah seharusnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi merupakan dua hal yang harus sejalan dan dicapai secara bersamaan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah tercermin pada adanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan daerah khususnya dibidang perkonomian. Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pemerataan ekonomi akan memperlebar jurang pemisah antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya (kaya dan miskin) atau antara wilayah yang satu dengan yang lain (maju dan tertinggal) sebagai suatu ketimpangan.

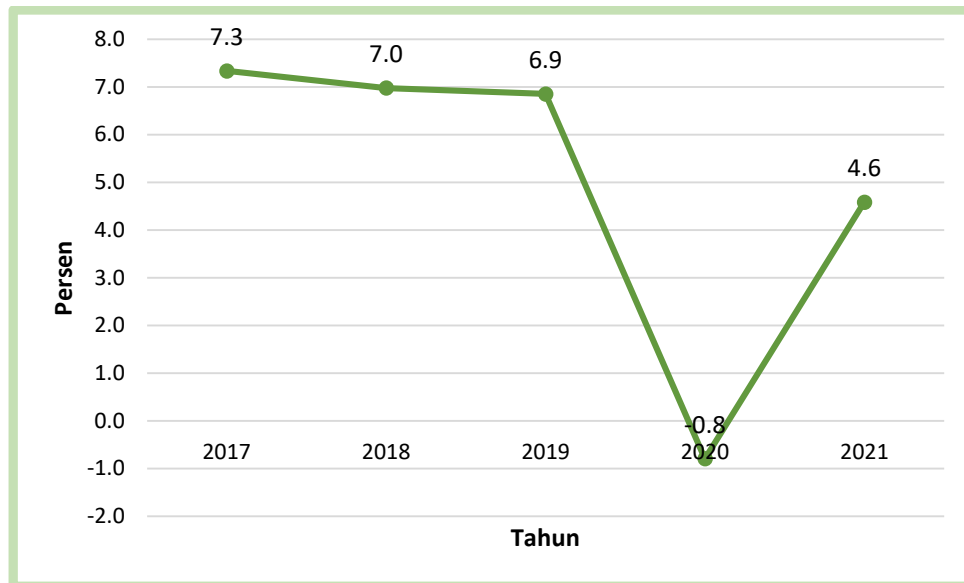
Ketimpangan yang tinggi dapat memunculkan berbagai permasalahan antara lain kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Dampak lain seperti peningkatan migrasi dari daerah yang miskin ke daerah yang maju, tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi rendah yang terlihat dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat berlanjut menjadi tindak kriminalitas, konflik antar masyarakat, dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurut Sjafrizal (2008), ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah, salah satunya ialah adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki antar wilayah dimana wilayah yang memiliki sumber daya alam

besar otomatis memiliki keunggulan produksi dan biaya produksi relatif murah, adanya perbedaan kondisi demografis yang dimiliki suatu wilayah tentunya akan menimbulkan potensi menanam investasi atau penanaman modal yang besar, begitu juga dengan adanya alokasi dana pembangunan yang berbeda antar wilayah mempengaruhi terbukanya peluang kesempatan kerja (Andiny, 2019).

Salah satu indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dengan melihat tercapainya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi suatu daerah. Para ekonom mendefinisikan dan mengukur pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, data diolah.

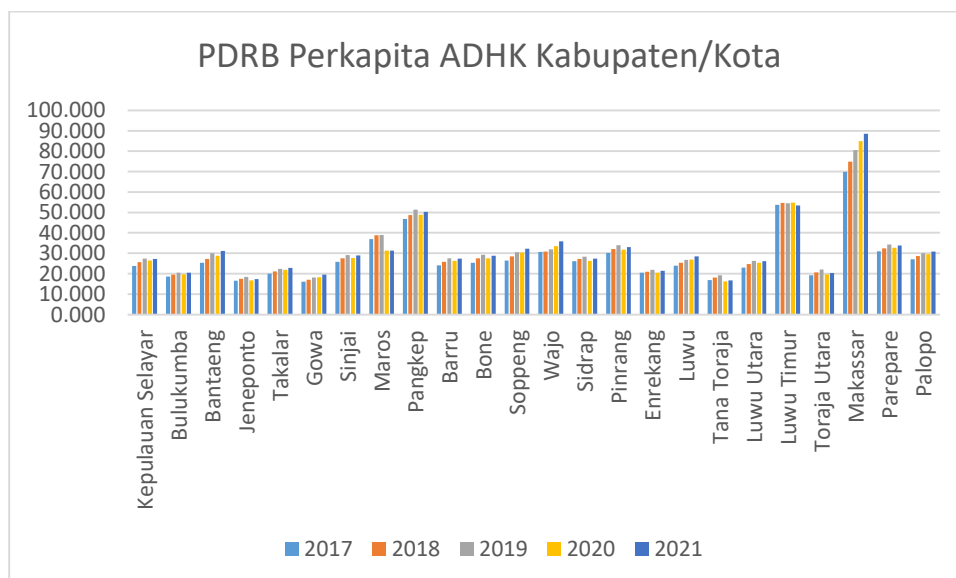
Pada Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017-2021 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 4,65 persen, sementara Pertumbuhan ekonomi secara Nasional sebesar 3,70 persen. Namun, pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan minus sebesar -0,8 persen. Kondisi ini tentunya merupakan efek dari adanya Pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi seluruh sektor ekonomi dan berdampak ke seluruh perekonomian Indonesia bahkan diseluruh negara di dunia ini.

Keberhasilan pembangunan ekonomi pada tingkat nasional tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Setiap daerah menghasilkan pencapaian yang berbeda-beda, sehingga beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang cepat, sementara daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Dari 24 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi tertinggi ialah Kabupaten

Bantaeng sebesar 8,93% sementara beberapa daerah lainnya rata-rata memiliki pertumbuhan dibawah 4,65% itu terjadi pada Kabupaten Maros (tumbuh 1,42%), Kabupaten Selayar (tumbuh 4,08%), Kabupaten Pangkajene Kepulauan (tumbuh 3,52%), Kabupaten Luwu Timur (minus 1,33%), Kabupaten Luwu Utara (tumbuh 3,96%), Kabupaten Toraja Utara (tumbuh 4,11%), Kota Parepare (tumbuh 4,47%) bahkan Kota Makassar hanya tumbuh 4,53%.

Walaupun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tergolong cukup baik, namun nyatanya Provinsi Sulawesi Selatan termasuk ke dalam 10 provinsi yang memiliki ketimpangan terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memantau terkait aspek pemerataan pendapatan karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia.

Gambar 1.2 PDRB perkapita ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, data diolah

Gambaran ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditunjukkan atau dilihat dari bentuk perkembangan PDRB Perkapita antar Kabupaten/Kotanya. Dalam gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan PDRB Perkapita antar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dari 2017-2021, dimana daerah seperti Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pangkep memiliki PDRB perkapita yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya seperti Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Tana Toraja.

Di setiap daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki perbedaan dari segi sumber daya yang memadai dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumber daya yang minim, sehingga yang nantinya akan menimbulkan ketidakmerataan atau ketimpangan pembangunan yang terjadi di setiap daerah. Untuk mengatasi adanya ketimpangan di daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi daerah), dimana daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, sehingga daerah tersebut akan mampu melaksanakan pembangunan daerahnya semaksimal mungkin dan diharapkan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri sebaik-baiknya serta pelaksanaan pembangunan antar daerah semakin berimbang. Untuk melihat gambaran keuangan di suatu daerah, maka dapat tercermin dari kapasitas fiskalnya.

Kapasitas fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Nazaikha & Rahmawati, 2021). Pada dasarnya, kapasitas fiskal

berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Dimana, pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dalam penerimaan daerah.

PAD adalah mencerminkan kemampuan keuangan daerah yang baik dan sedikit ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan pemerintah pusat merupakan ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi. Namun, dikarenakan setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah di daerahnya, maka hal tersebut akan menimbulkan ketimpangan pendapatan antar daerah, dengan demikian untuk mengatasi ketimpangan tersebut pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Penerimaan-penerimaan inilah yang digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di daerahnya. Beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Akai dan Sakata (2005) yang dimana dalam penelitiannya menemukan bahwa rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah di Amerika Serikat dari tahun 1993-2000.

Pendapatan asli daerah Sulawesi Selatan dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh *Covid-19* dan naik kembali di tahun 2021 sebesar Rp 5.081 Milyar. Sedangkan, total penerimaan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir, yaitu 2017-2021 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar Rp 12.350 Milyar di tahun 2021. Dengan demikian, pemerintah daerah harus dapat mengeksplorasi PAD agar dapat menjadi prioritas sumber keuangan daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan untuk mencapai pembangunan

daerah. Hal tersebut dikarenakan PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik itu dalam pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.

Ketersediaan fasilitas layanan publik membuat masyarakat lebih giat dan bersemangat dalam bekerja dan dengan adanya fasilitas yang baik juga meningkatkan jumlah investasi di masing-masing daerah yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi hingga pada akhirnya mengurangi ketimpangan yang ada. Menurut Jhingan (2004), investasi memiliki peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal, dimana hal tersebut sesuai dengan teori dikemukakan oleh Harrod-Domar (Adipuryanti dan Sudibia, 2015). Menurut Sukirno (2004), penanaman modal dalam bentuk investasi akan memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang dan jasa, maka tenaga kerja dapat diserap lebih banyak, sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita (Harahap, 2022). Investasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembentukan modal tetap bruto, dimana PMTB atau investasi fisik merupakan besaran penambahan dan pengurangan barang modal tetap untuk kebutuhan produksi pada suatu aktivitas ekonomi pada periode tertentu. PMTB di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan selama 5 tahun berturut-turut sebesar 134.157 Milyar Rupiah di tahun 2021. Naiknya investasi di suatu wilayah, maka akan membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat

pendapatan perkapita akan meningkat karena produktivitas masyarakat mengalami peningkatan.

Disamping itu, dengan meningkatnya investasi, maka tenaga kerja yang diserap juga akan lebih banyak, kemudian akan meningkatkan produktivitas, tentunya hal tersebut tidak lepas dari sumber daya manusia di daerahnya. Pada dasarnya, sumber daya manusia ialah sebagai tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Berbicara mengenai tenaga kerja, apabila jumlah tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia semakin banyak, maka untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian juga akan meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang ada di suatu daerah. TPAK Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan, namun dikarenakan akibat dari adanya *covid-19* menyebabkan TPAK di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 63,40 persen. Kemudian, pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 64,73 persen. Kenaikan angka tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan semakin besar. Dengan demikian, daerah yang memiliki kualitas tenaga kerja yang baik, maka akan mampu memberikan peningkatan output bagi daerahnya dan pada akhirnya akan mengurangi ketimpangan wilayah serta akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dengan adanya kapasitas fiskal yang dilihat dari peningkatan kapasitas fiskal, Investasi serta sumber daya manusia diharapkan ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan juga akan menurun, mengingat di satu sisi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan yang baik. Atas kondisi tersebut penulis menilai bahwa apabila terjadinya ketimpangan yang dimana merupakan

masalah yang harus dicarikan penyelesaiannya karena apabila ketimpangan semakin besar, maka akan menimbulkan terjadinya konflik serta masalah sosial lainnya, sehingga apabila hal tersebut dibiarkan terus menerus bisa menyebabkan ketidakstabilan didalam suatu perekonomian. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengusung topik mengenai ketimpangan wilayah dengan judul “**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN WILAYAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2000-2021**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh kapasitas fiskal terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana pengaruh investasi terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana pengaruh sumber daya manusia terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kapasitas fiskal terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan

3. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan ekonomi khususnya dalam membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan masalah disparitas pendapatan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Sebagai bahan referensi bagi penulis maupun peneliti dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan disparitas pendapatan.
3. Serta untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan penulis selama kuliah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konseptual

2.1.1 Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pada dasarnya menimbulkan suatu masalah pembangunan dalam suatu wilayah yang akan berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dalam wilayah tersebut. Ketimpangan wilayah atau disparitas regional merupakan salah satu permasalahan yang selalu timbul dalam pembangunan ekonomi pada suatu wilayah. Hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi demografis pada masing-masing wilayah, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut akan membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong pembangunannya juga akan berbeda. Dengan kata lain, ketimpangan timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi, dimana ketidakmerataan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Munculnya permasalahan mengenai ketimpangan, maka hal tersebut sangat penting untuk diatasi, hal ini dikarenakan ketimpangan merupakan salah satu tolak ukur dalam proses pembangunan suatu daerah dan sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mengurangi ketimpangan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pemerintah mengenai ketimpangan wilayah agar nantinya mampu menurunkan ketimpangan yang terjadi. Terjadinya ketimpangan wilayah ini akan memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah, seperti terjadinya perbedaan pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh Karena itu,

aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun, disamping itu, timbulnya ketimpangan juga memiliki dampak positif yang dapat mendorong dan memotivasi daerah tertinggal untuk mengejar ketertinggalannya. Adapun dampak negatif dari adanya disparitas pendapatan yang dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas social serta kesejahteraan yang rendah.

Pada awalnya, ketimpangan wilayah dimunculkan oleh Douglas C North dalam teori terkait pertumbuhan neo klasik membentuk persoalan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Teori tersebut membahas dugaan terkait kaitan antara ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan tingkat pembangunan ekonomi nasional. Dugaan itu mulai dikenal dengan sebutan Hipotesa Neo-Klasik. Menurut Hipotesa Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunann terus berlanjut, maka secara berangsur – angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara – negara berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah (Thofan, 2019).

Terdapat juga teori lain yang berbicara mengenai ketimpangan dalam ekonomi, yaitu teori yang dikemukakan oleh Kuznet bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dengan kata lain ketimpangan yang tinggi. Namun, pada tahap-tahap berikutnya

hal tersebut akan membaik. Hipotesis tersebut dikenal dengan kurva U terbalik (*inverted U curve*). Simon Kuznet juga menyatakan bahwa dikarenakan pertumbuhan ekonomi perlu adanya transformasi dari aktivitas berbasis pedesaan (ketimpangan rendah) ke aktivitas berbasis perkotaan (ketimpangan tinggi), oleh karena itu, ketimpangan pendapatan tidak dapat dihindari pada awal pembangunan (Yusuf, 2018).

Menurut Sjafrizal (2008), ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah, yaitu:

1) Perbedaan sumber daya alam

Salah satu penyebab terjadinya ketimpangan wilayah ialah disebabkan karena adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang tinggi, tentunya akan memproduksi barang dengan biaya yang relative rendah, sehingga hal tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut akan menjadi lebih cepat.

2) Perbedaan kondisi demografis

Perbedaan kondisi demografis yang dimaksud ialah perbedaan kondisi ketenagakerjaan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, jumlah penduduk dan lain-lain. Adanya perbedaan tersebut, maka akan mempengaruhi produktivitas suatu wilayah. Apabila suatu wilayah memiliki kondisi demografis yang baik, maka produktivitas akan menjadi lebih tinggi, sehingga hal ini akan menarik bagi penanaman modal untuk melakukan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan.

3) Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah. Apabila mobilitas tersebut kurang lancar, maka daerah yang memiliki kelebihan produksi tidak dapat memasarkan atau menjual hasil produksinya ke daerah yang membutuhkan.

4) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Daerah yang memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar, maka pertumbuhan ekonomi tersebut akan cenderung lebih cepat. Adanya konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu daerah disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ialah memiliki sumber daya alam yang banyak, kondisi demografis serta meratanya fasilitas transportasi.

5) Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Investasi memiliki peranan penting dalam pembangunan di suatu daerah. Daerah yang memiliki investasi lebih besar tentunya akan mendorong pembangunan di wilayah tersebut. Dikarenakan dengan adanya investasi, tentunya akan membuka lapangan pekerjaan dan secara tidak langsung juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut (Andiny, 2019).

Menurut Gie (1983) masalah ketimpangan wilayah dapat ditinjau dari tiga segi yaitu *regional income disparity*, *urban rural*, *income disparity size of distribution on income*. Ketimpangan jenis pertama lebih bersifat struktural. Di tengah permasalahan pembangunan yang kian pelik dan beragam di tiap daerah, maka daerah mau tidak mau harus diberikan porsi yang semakin besar untuk mengidentifikasi sendiri permasalahan yang dihadapinya dan merumuskan

strategi dan langkah-langkah pemecahannya. Ketimpangan kedua, yakni kesenjangan antar sektor, lebih disebabkan oleh strategi pembangunan yang bias ke sektor perkotaan atau ke sektor modern sehingga sektor tradisional dan pembangunan daerah pedesaan relatif tertinggal. Ketimpangan jenis ketiga, yakni ketimpangan pendapatan. Jika pendapatan rata-rata masyarakat secara keseluruhan telah meningkat, serta diiringi oleh kesenjangan yang juga meningkat. Apalagi kalau kelompok sosial yang berpendapatan tinggi meraih dan menikmati kekayaan lewat cara-cara yang justru dapat merugikan masyarakat yang berpendapatan lebih rendah (Kurniasih, 2013).

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah perubahan keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu, dimana terjadinya perubahan jumlah produksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu yang berdasarkan oleh beberapa indikator. Menurut Sukirno (2016) pertumbuhan ekonomi ialah menggambarkan keadaan dimana suatu perekonomian telah mengalami perkembangan ekonomi, dimana barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan dapat mencapai taraf kemakmuran masyarakat yang lebih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi berasal dari adanya perubahan teknologi dan akumulasi modal. Perubahan teknologi adalah pengembangan barang dengan cara yang baru dan lebih baik untuk memproduksi barang dan jasa, sedangkan akumulasi modal adalah

investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional.

Para ekonom yang telah mempelajari pertumbuhan secara produktif telah menemukan bahwa terdapat empat roda dalam pertumbuhan ekonomi, baik itu di Negara yang maju maupun berkembang (Samuelson & Nordhaus, 2010), diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia, yang meliputi persediaan tenaga kerja, pendidikan, keterampilan dan lain-lain.
- b. Sumber daya alam, yang meliputi tanah, mineral dan sebagainya.
- c. Modal (pabrik, jalan, mesin dan investasi).
- d. Perubahan teknologi dan inovasi

Salah satu tokoh ekonom klasik, yaitu Adam Smith (dalam Abrar, 2018) berpendapat bahwa terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1) Pertumbuhan penduduk

Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian, sehingga kegiatan ekonomi akan bertambah.

2) Pertumbuhan output total

Menurut Adam Smith, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan output total suatu negara, yaitu:

- a. Sumber daya alam, dimana Jumlah penduduk dan persediaan barang modal yang tersedia mempengaruhi pertumbuhan output

jika sumber daya alam yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal. Namun, ketika semua sumber daya alam ini dieksploitasi sepenuhnya, maka produksi akan berhenti tumbuh.

- b. Sumber daya manusia. Dimana dalam hal ini, sumber daya manusia ialah sebagai salah satu input dalam proses produksi.
- c. Akumulasi modal. Akumulasi modal yang dimiliki merupakan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan dapat disebut sebagai dana pembangunan, dimana cepat lambatnya pembangunan ekonomi tergantung pada ketersediaan dana pembangunan tersebut. Disamping itu, modal juga merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

Selain itu, adapun teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Kuznet, dimana menurut teori pertumbuhan ekonomi Kuznet, pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi dalam jumlah besar kepada masyarakatnya dalam jangka waktu yang lama. Kuznets (dalam Zulfa, 2016) juga menjelaskan bahwa ada tiga faktor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a) Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dilihat dari meningkatnya persediaan barang secara terus menerus
- b) Teknologi yang maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan tingkat pertumbuhan kemampuan dalam menyediakan berbagai macam barang kepada penduduk
- c) Penggunaan teknologi perlu dilakukan secara luas dan efisien, sehingga inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat secara tepat.

Cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkannya dengan pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya. Dengan kata lain, suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang cepat apabila dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti. Sedangkan dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat apabila mengalami penurunan atau fluktuatif dari tahun ke tahun. Adapun cara menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, yaitu dengan menghitung hasil pengurangan dari PDRB tahun tertentu dengan PDRB tahun sebelumnya, kemudian membaginya dengan PDRB tahun sebelumnya dan hasilnya dikalikan dengan seratus persen.

2.1.3 Kapasitas Fiskal

Seperti yang telah diketahui, bahwa otonomi daerah merupakan bagian dari system pemerintahan di Indonesia. Untuk melaksanakan Undang-Undang otonomi daerah, maka masing-masing daerah diberi kesempatan untuk lebih mengembangkan potensi daerahnya sendiri, sehingga pendapatan daerah akan semakin meningkat. Dengan kata lain, dengan adanya otonomi daerah, maka dapat memacu suatu daerah untuk berupaya dalam menggali potensi sumber-sumber alam yang ada, sehingga mendorong terciptanya kenaikan pendapatan daerah serta peluang kerja juga terbuka yang akhirnya akan meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Kriteria untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya atau daerahnya dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya, dimana faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Konsep Musgrave (1980) dalam Sumarsono (2009) Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah terdapat beberapa variable yang menunjukkan hal tersebut, salah satunya adalah kapasitas fiskal,

dimana kapasitas fiskal menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 126/PMK.07/2019 adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Teori Kapasitas Fiskal dikemukakan oleh Richard A. Musgrave pada tahun 1959 dalam bukunya yang berjudul "*The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*", dimana Musgrave mengemukakan bahwa kapasitas fiskal ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu: kemampuan negara untuk mengumpulkan pendapatan, kemampuan negara untuk mengendalikan pengeluaran, dan kemampuan negara untuk mengendalikan jumlah utang. Teori ini menjadi dasar dalam pemikiran tentang perencanaan fiskal di negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Teori ini digunakan untuk mengukur kinerja fiskal suatu negara dan mengevaluasi kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, kapasitas fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Nazaikha & Rahmawati, 2021). Dengan demikian, kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya perlu didukung kapasitas fiskal sehingga anggaran yang tersedia dapat memadai untuk membangun berbagai infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pada dasarnya, kapasitas fiskal berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD). Dimana, pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dalam penerimaan daerah.

Penerimaan daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penerimaan daerah

adalah semua uang yang masuk ke kas Daerah. Dimana, penerimaan daerah terdiri atas:

1) Pendapatan Daerah

Dalam peraturan yang sama, pendapatan daerah dijelaskan sebagai semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu. Adapun komponen dari pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

2) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Salah satu komponen dalam pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah, dimana pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dan dikelola sendiri oleh pemerintah. Kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-

undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui PAD.

Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Santoso (1995) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah (Fitriani, 2020).

2.1.4 Investasi

Secara umum, investasi merupakan penanaman modal atau uang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari adanya penanaman modal tersebut di masa yang akan datang. Dengan adanya investasi, maka pertumbuhan di suatu negara akan meningkat karena banyak para investor yang akan melakukan investasi di negara tersebut. Dimana, modal dari investor tersebut nantinya akan ditujukan untuk proses produksi, sehingga akan menghasilkan barang dan jasa yang tentunya akan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Menurut (Sukirno, 2015), Investasi di definisikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman-penanaman modal, dimana pembelian barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barangbarang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Bawinti, 2018). Singkatnya, investasi ialah kegiatan pembelanjaan atau pengeluaran untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian, seperti mesin, jalan dan lain-lain, sehingga dengan adanya investasi dapat mendongkrak perekonomian suatu Negara.

Salah satu teori yang telah dikembangkan dan menjelaskan mengenai investasi ialah teori Harrod-Domard, dimana teori ini menjelaskan bahwa kegiatan investasi dianggap sebagai salah satu faktor penting dan memiliki pengaruh terhadap perekonomian, dimana dengan adanya investasi, maka kapasitas barang-barang modal dalam perekonomian akan bertambah. Dengan bertambahnya kapasitas barang modal, maka permintaan agregat juga haruslah bertambah. Hal tersebut menuntut adanya investasi untuk menambah kemampuan dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Dengan demikian, untuk menjamin suatu pertumbuhan ekonomi yang teguh, maka investasi harus terus-menerus mengalami penambahan dari tahun ke tahun (Sukirno, 2016).

Dalam proses pembanguana ekonomi, tentunya setiap Negara memerlukan dana atau investasi dalam melakukannya. Menurut pada model Solow-Swan, negara Negara yang menabung dan menginvestasikan sebagian besar output, maka negara itu akan memiliki persediaan modal pada kondisi *steady-state* dan tingkat pendapatan yang tinggi (Masniadi, 2012). Oleh karena itu, suatu Negara perlu adanya investasi agar dapat meningkatkan akumulasi modal negara tersebut. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat investasi dan ketersediaan modal di suatu wilayah. Investasi fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal dalam kebutuhan produksi pada suatu aktivitas ekonomi pada periode tertentu yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan lain-lain. Pengeluaran untuk meningkatkan penggunaan tanah seperti pembukaan hutan untuk dijadikan perkebunan,

daerah pemukiman, bendungan dan lain-lain serta untuk perluasan area pertambangan merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto.

Investasi yang naik dari tahun ketahun akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja juga akan semakin besar karena dengan tingginya investasi maka proses produksi naik, sehingga akan mengakibatkan semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi. Namun, apabila investasi (PMTB) di suatu wilayah lebih kecil daripada penambahan penduduknya tentunya akan menimbulkan ketimpangan yang terjadi pada wilayah tersebut.

2.1.5 Sumber Daya Manusia

Secara umum, sumber daya manusia (*human resource*) adalah faktor penting sebagai penggerak dalam perekonomian untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Secara mikro, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sedangkan, secara makro merupakan merupakan jumlah penduduk dengan usia produktif yang ada di suatu wilayah. Dalam teori salah satu ekonom klasik, yaitu Jean Baptiste Say (1767-1832) juga berpendapat bahwa peningkatan produksi akan diiringi dengan peningkatan pendapatan, apabila usaha peningkatan produktivitas diimbangi juga dengan peningkatan input faktor produksi tenaga kerja (Idris, 2016). Dengan demikian, sumber daya manusia ialah sebagai tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi.

Tenaga kerja secara umum adalah penduduk yang siap bekerja. Definisi tenaga kerja memang berbeda-beda tapi sebenarnya memiliki inti yang sama yaitu penduduk yang dirinya sudah siap untuk bekerja. Definisi tenaga kerja

menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah seluruh penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih yang potensial memproduksi barang dan jasa. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 menyebutkan definisi tenaga kerja yaitu setiap orang baik laki-laki maupun wanita yang mampu melakukan pekerjaan baik guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Dengan kata lain, angkatan kerja ialah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas yang sudah bekerja, belum bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk yang masuk ke golongan yang bersekolah, mengurus rumah tangga serta penerima pendapatan (pensiunan). Maka, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia produktif yang sedang bekerja dan tergolong pada angkatan kerja, dengan kata lain tenaga kerja adalah bagian dari angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja merupakan penduduk dalam usia produktif yang terdiri dari tenaga kerja, sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Untuk menentukan angkatan kerja maka dibutuhkan informasi mengenai jumlah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun, dan data jumlah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja. Berdasarkan kedua jenis tersebut maka penduduk berusia 15-64 tahun merupakan angkatan kerja, sedangkan kelompok kedua yaitu penduduk usia 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja dikatakan bukan angkatan kerja. Dengan demikian, perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dikatakan sebagai TPAK atau singkatan dari tingkat partisipasi angkatan kerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) ialah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari yang merujuk pada suatu waktu. Apabila jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja semakin besar, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja yang dimana akan mengakibatkan semakin kecil TPAK. Selain itu, TPAK juga merupakan angka yang menggambarkan penyediaan atau penawaran tenaga kerja. Untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja apa suatu wilayah ialah dengan membagi jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) kemudian mengalikannya dengan seratus.

Menurut Simanjuntak (1998) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Tenaga Kerja antara lain (Wahyuningtias, 2019):

a. Jumlah Penduduk yang masih bersekolah

Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang bersekolah, maka jumlah angkatan kerja semakin kecil yang selanjutnya berdampak pada TPAK yang juga semakin kecil. Penyediaan fasilitas pendidikan, kondisi dan penghasilan keluarga memberikan pengaruh pada jumlah penduduk yang memutuskan untuk bersekolah.

b. Jumlah Penduduk yang mengurus rumah tangga

Angka TPAK akan semakin kecil jumlahnya ketika semakin banyak tiap-tiap anggota keluarga yang mengurus rumah tangga.

c. Umur

Penduduk laki-laki terutama yang berumur 25-55 tahun umumnya dituntut menafkahi keluarganya sehingga TPAK relatif besar. Sedangkan penduduk

yang berusia lebih dari 55 tahun cenderung menurunkan TPAK karena pada usia ini peroduktivitas kerja menurun dari adanya keputusan untuk pensiun.

d. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi kualitas atau jenjang pendidikan individu, maka akan membuat kesempatan bekerja semakin luas. Sehingga pada akhirnya TPAK akan cenderung mengalami kenaikan.

e. Upah

Semakin tinggi upah di pasar tenaga kerja, maka semakin banyak orang yang tertarik masuk ke pasar tenaga kerja.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Wilayah

Salah satu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan merupakan sasaran yang utama untuk dijadikan sebagai tujuan pembangunan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan merupakan proses pembangunan, selain terdapat pertumbuhan yang tinggi pembangunan ekonomi juga harus dapat mengurangi tingkat ketimpangan.

Berbicara mengenai hubungan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan wilayah, para ekonom telah lama beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat menyelesaikan masalah ketimpangan dan kemiskinan. Teori pertama berasal dari Kuznet yang beranggapan bahwa ketika pembangunan dimulai, yaitu pada awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan cenderung tinggi, namun setelah mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu, maka ketimpangan akan cenderung makin menurun dan jika digambarkan dalam

bentuk kurva, maka akan terbentuk kurva U-terbalik, kemudian pada akhirnya tingkat ketimpangan akan turun atau lebih rendah pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Todaro, 2012).

Namun, menurut Kuncoro, 2006 pertumbuhan ekonomi yang cepat belum tentu berdampak positif terhadap pembangunan. Justru pertumbuhan ekonomi yang cepat akan memperparah ketimpangan, karena pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan pemerataan, dikarenakan terdapat *trade off* antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ketimpangan (Putra dan Lisna, 2020).

Dalam penelitian dilakukan Purwanti dan Setyari (2018), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hubungan antara pertumbuhan dan tingkat ketimpangan di dalam Kawasan perkotaan SARBAGITA menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan namun diiringi dengan peningkatan ketimpangan. Setelah titik waktu tertentu, hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan memiliki arah yang berlawanan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi diiringi dengan terjadinya pemerataan antar wilayah.

Adapun dalam Alesina dan Rodrik (1994), dengan terjadinya ketimpangan pendapatan yang tinggi, maka akan menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa atau output. Dengan menurunnya daya beli masyarakat tentunya hal tersebut akan menghambat kegiatan ekonomi dalam menghasilkan output, sehingga pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga akan terhambat (Rahmadi, 2019).

2.2.2 Hubungan Kapasitas Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi

Teori yang dapat menjelaskan hubungan antara kapasitas fiskal dengan ketimpangan wilayah adalah teori federalism fiskal. Federalisme fiskal adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bergantung dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan. Dalam sistem pemerintahan federal, pemerintah pusat memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk mengumpulkan dan mengeluarkan dana, sementara pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pembangunan di wilayahnya masing-masing. Teori ini menekankan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama dalam mengelola sumber daya fiskal, agar dapat mencapai keseimbangan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Teori ini juga menyoroti peran pemerintah dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial antar wilayah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan dalam mengatur keuangannya yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian pemerintahannya, sehingga pemerintah daerah dapat menggali dan mengembangkan potensi daerahnya pada pembangunan di wilayahnya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antar wilayah yang tercakup dalam daerah tersebut (Prasetyia, 2013).

Dengan kata lain, adanya pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan kewenangan fiskal yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian atau kemampuan keuangan daerah yang dapat tercermin dalam kapasitas fiskal, maka diharapkan pemerintah daerah dapat menggali dan mengembangkan potensi daerahnya, dimana hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

pada daerahnya agar lebih baik yang selanjutnya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kapasitas fiskal ialah menggambarkan kemampuan keuangan suatu daerah, dimana dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur kapasitas fiskal ialah rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dengan adanya PAD yang meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah juga akan mengalami peningkatan, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potens-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Menurut Tambunan 2006, Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri (Rori, 2016).

Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Suharyanto (2020), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga, dapat diartikan bahwa semakin tinggi kemampuan keuangan daerah, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi peningkatannya tidak terjadi secara signifikan.

Mengingat besarnya dukungan pendanaan dalam pengelolaan anggaran untuk melaksanakan kewenangan yang telah diberikan kepada daerah, maka besarnya sumber pendanaan dari pemerintah pusat harus digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah itu sendiri. Sehingga, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik akan lebih efisien dan efektif.

2.2.3 Hubungan Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Roy Harrod dan Evsey Domar yang merupakan ahli ekonom mengembangkan teorinya yang lebih dikenal sebagai teori Harrod-Domar, dimana di dalam teori Harrod-Domar yang menjelaskan mengenai investasi yang beranggapan bahwa investasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam perekonomian, dimana dengan adanya investasi, maka akan meningkatkan kapasitas modal dan akan meningkatkan kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa. Pembentukan modal ini dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat. Dengan demikian, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh, maka investasi harus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (Sukirno, 2000). Teori ini didukung dengan hasil penelitian oleh Dharma dan Djohan (2015), dimana investasi menunjukkan nilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang berarti dengan adanya peningkatan investasi, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Namun, berbeda dalam jurnal Sulistiawati (2012), dimana investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh Rata-rata penggunaan PDRB untuk investasi adalah lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran untuk konsumsi, hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dimiliki suatu daerah ternyata tidak ditopang oleh investasi, melainkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan karena penyebaran investasi tidak merata di seluruh daerah.

Investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal tidak hanya dapat meningkatkan faktor produksi tetapi juga dapat memberikan kesempatan kerja

bagi masyarakat, dimana menurut Todaro (2000), investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional serta menciptakan lapangan kerja baru, sehingga kesempatan kerja semakin luas dan pendapatan masyarakat akan bertambah.

2.2.4 Hubungan Sumber Daya Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam teori Adam Smith (1729-1790) yang membahas mengenai alokasi sumber daya manusia, dimana Adam Smith menganggap bahwa manusia merupakan faktor produksi yang paling utama yang dapat menentukan kemakmuran suatu wilayah, dikarenakan tanpa adanya sumber daya manusia, maka alam (tanah) tidak akan terolah dengan baik (Sukarniati, 2019). Pada dasarnya, sumber daya manusia ialah sebagai tenaga kerja untuk menghasilkan barang ataupun jasa dalam perekonomian.

Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi menurut Solow yang mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu modal, tenaga kerja (pertumbuhan penduduk) dan teknologi. Dimana, Pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dapat dicapai dengan adanya peningkatan efisiensi pada penggunaan input kapital dan tenaga kerja. Sementara pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dipengaruhi oleh adanya akumulasi kapital yang menjadi kunci utama untuk mencapai jalur pertumbuhan optimal dan stabil (Nurwanda dan Rifai, 2018).

Todaro (2012) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja atau jumlah penduduk yang lebih besar akan menambah jumlah angkatan kerja, dimana jumlah angkatan kerja yang lebih besar tersebut maka akan menambah tingkat produksi karena produktivitasnya

juga meningkat serta penduduk yang lebih besar akan mengubah ukuran pasar domestiknya menjadi lebih besar. Dengan kata lain, semakin banyak masyarakat yang produktif, maka akan menghasilkan output yang tinggi pula. Dengan demikian, dengan adanya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang meningkat berarti tingkat kemakmuran masyarakat juga mengalami peningkatan, sehingga hal tersebut akan mendorong perekonomian suatu daerah.

Darzal (2016), naiknya partisipasi angkatan kerja atau produktivitas, maka akan mendorong bertambahnya output, dalam hal ini output diartikan sebagai pendapatan perkapita yang diterima oleh angkatan kerja tersebut. Semakin besar pendapatan atau upah yang didapatkan, maka semakin besar kemampuan masyarakat tersebut untuk melakukan konsumsi, sehingga akan mendorong peningkatan laju pertumbuhan.

2.3 Tinjauan Empiris

Azhari, dkk (2020) meneliti tentang “Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio kemandirian daerah, efektivitas daerah rasio, rasio efisiensi daerah dan rasio pertumbuhan pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan Eviews. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas wilayah dan rasio efisiensi wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Meyvi Rine Mirah, dkk (2020) meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*Path Analysis*) yang merupakan perluasan dari analisis linear berganda. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja Laki laki dan Perempuan mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi juga TPAK laki-laki dan Perempuan mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

Erni Panca Kurniasih (2013) meneliti tentang “Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznet”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Barat dan untuk membuktikan apakah hipotesis Kuznet tentang kurva U terbalik berlaku di Provinsi Kalbar. Dalam penelitian ini menggunakan regresi linear menggunakan data panel tahun 2001–2010. Adapun hasil penelitian ini adalah didapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan wilayah, begitupun sebaliknya. Temuan lainnya membuktikan bahwa hipotesis Kuznet tentang pertumbuhan yang tinggi diiringi juga dengan ketimpangan yang tinggi antar wilayah ternyata tidak berlaku di Provinsi Kalbar.

Ririhena dan Maro (2018) meneliti tentang “Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Pekerjaan di Provinsi Papua”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari investasi pada

lapangan kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis jalur (*path analysis*) dan *sobel test*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh yang signifikan dan korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka lapangan pekerjaan juga akan meningkat serta investasi tidak mempengaruhi lapangan kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua.

Sisca Vaulina dan Limetry Liana (2015) meneliti tentang “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Riau”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Riau. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipologi Klassen, indeks ketimpangan Williamson dan Indeks Entropi Theil. Hasil penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau terletak pada Kuadran I, kemudian berdasarkan perhitungan indeks Williamson, Provinsi Riau dari tahun 2010-2014 memiliki ketimpangan dengan kisaran 0,727-0,960. Sedangkan berdasarkan indeks Entropi Theil, pada tahun analisis diperoleh nilai rata-rata indeks 0,204.

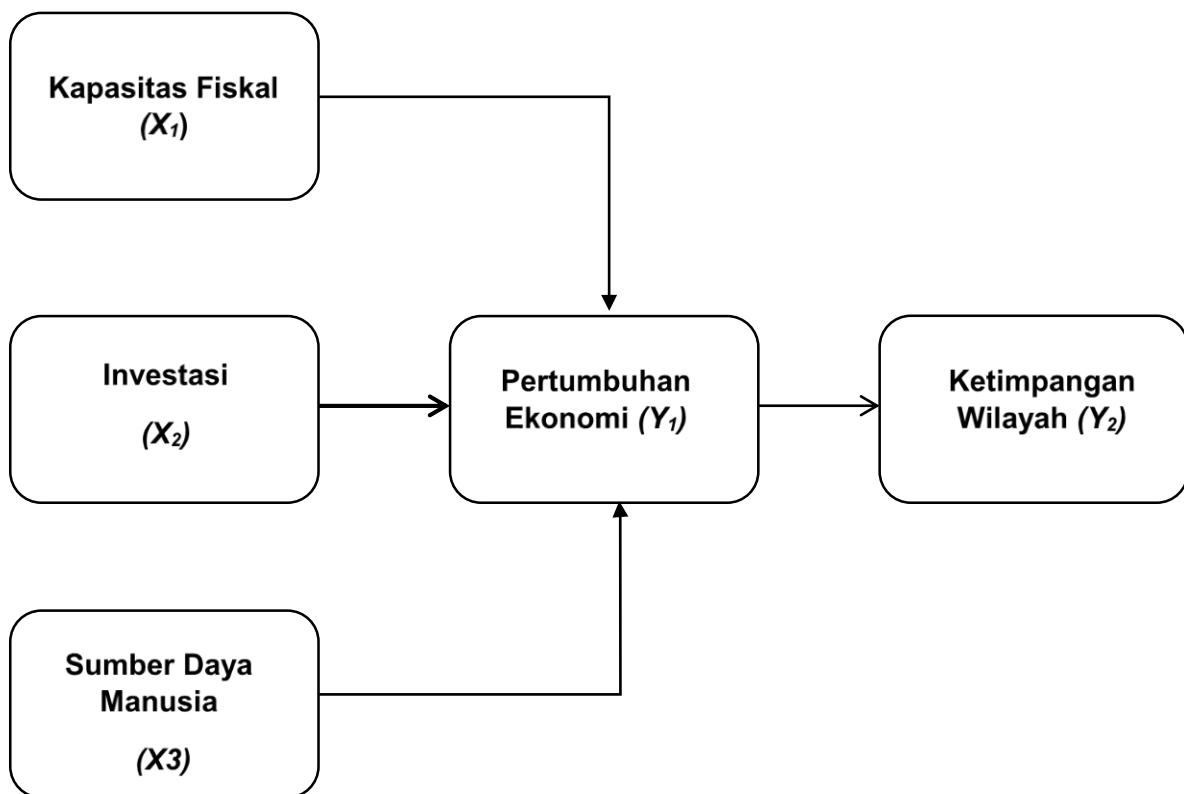
2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua variable, yaitu variable dependen (Y) dan variable independent (X). dimana, penelitian ini akan melihat pengaruh kapasitas fiskal (X1), investasi (X2) dan sumber daya manusia (X3) melalui pertumbuhan ekonomi (Y1) terhadap ketimpangan wilayah (Y2).

Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang sering terjadi di setiap daerah yang juga merupakan masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan, dimana pembangunan ekonomi dapat dikatakan

berhasil apabila suatu wilayah/daerah tercermin pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata serta pertumbuhan ekonominya.

Oleh karena itu, dengan adanya kapasitas fiskal yang merupakan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan, peningkatan investasi serta banyaknya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, diharapkan mampu menurunkan ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian yang telah dijelaskan dan digambarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga kapasitas fiskal berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi.
2. Diduga investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi.
3. Diduga sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pengaruh kapasitas fiskal, investasi dan sumber daya manusia terhadap ketimpangan wilayah melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2021.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berdasarkan runtun waktu 2000-2021. Adapun sumber data dalam penelitian ini yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Statistik Keuangan Daerah dan berbagai situs maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data atau analisa untuk mendapatkan informasi melalui beberapa catatan, literatur, buku serta berbagai laporan yang berkaitan untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

3.4 Metode Analisis Penelitian

3.4.1 Indeks Willismson

Indeks Williamson merupakan salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat disparitas antar wilayah, seperti antar wilayah dalam suatu Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam suatu provinsi maupun antar provinsi dalam Negara. Dasar perhitungan Indeks ini